

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Suatu negara dapat dikatakan sehat dapat dilihat dari kondisi ekonominya atau sering disebut kondisi laporan keuangan. Semua instansi baik pemerintahan maupun swasta diwajibkan menggunakan sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar. Tidak hanya pemerintahan pusat, pemerintahan daerah juga wajib menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tinggi guna mempermudah para pemangku kepentingan ataupun pimpinan terkait pengambilan keputusan untuk pengembangan instansinya. Di era reformasi ini semakin banyak updating peraturan ataupun kebijakan guna pencapaian kinerja dengan hasil laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat bagi masyarakat, sebagai bentuk pelaporan pemerintah daerah atas kinerja keuangannya kepada para pemangku kepentingan. Pemerintah daerah harus mampu menghasilkan untuk laporan keuangan yang berkualitas. Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dengan empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Mahartini, 2020)

Penerapan kebijakan BLUD yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 pada pasal 31 bahwa penerapan BLUD diprioritaskan untuk pelayanan kesehatan yaitu RSUD, Puskesmas, dan Balikesmas. Dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tepatnya pasal 105 ayat 2 dijelaskan bahwa BLUD wajib menyesuaikan dan menerapkan peraturan ini paling lambat dua tahun setelah peraturan ditetapkan. Menteri Keuangan

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan BLU. Puskesmas BLUD diwajibkan menyusun laporan keuangan dengan standar Badan Layanan Umum guna membuktikan bahwa kondisi keuangan unit puskesmas tersebut dapat dinilai sehat. (Groot, 2018)

Tabel 1.1
DATA LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS TAYU I
TAHUN 2017-2021

No	Laporan Keuangan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Laporan Realisasi Anggaran			204.518.352	85.616.272	746.825.239
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	151.119.060	18.883.121
3	Neraca (Laporan Posisi Keuangan)	3.714.296.133	3.857.567.379	3.893.779.111	3.853.255.024	3.545.884.103
4	Laporan Operasional	181.270.862	120.528.450	47.879.120	218.745.147	303.928.211
5	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak Ada	Tidak Ada	3.891.187.202	3.836.992.085	3.540.524.135
6	Laporan Arus Kas	314.414.674	441.253.684	236.735.332	151.119.060	18.883.121
7	Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: BLUD Puskesmas Tayu I, 2022

Salah satu syarat pengajuan untuk menjadi BLUD Puskesmas ialah memiliki laporan keuangan. Pada tahun 2017 dan 2018 BLUD Puskesmas Tayu I tidak memiliki laporan realisasi anggaran secara benar menurut peraturan yang berlaku, yang dimiliki hanya laporan realisasi anggaran per kode rekening yang digunakan sebagai pelaporan bulanan. Selanjutnya ditahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga belum memiliki Laporan perubahan saldo anggaran lebih, namun hanya ada angka silpa yang diperoleh dari total anggaran dikurangi dengan total realisasi anggaran yang mengindik pada laporan realisasi per kode rekening dan tanpa adanya pelaporan secara khusus terkait sisa anggaran tersebut. Ditahun 2017 dan 2018 juga tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, yang ada hanya pelaporan

secara sederhana. Penggunaan aplikasi SIA (Sistem Informasi Akuntansi) juga terhenti begitu saja karena terhambat oleh sumber daya manusia dan sistemnya yang sering mengalami eror. Sehingga, pencatatan dan pembukuan dijalankan secara manual tanpa adanya sistem pencatatan akuntansi berbasis aplikasi. Oleh karena itu, hanya Dinas Kesehatan dan BPKAD yang menginput akun – akun komponen dari laporan keuangan melalui aplikasi Simda sesuai dengan BLUD Puskesmas masing-masing. BLUD Puskesmas hanya membuat laporan-laporan secara sederhana yang kemudian direkap oleh Dinas Kesehatan untuk disusun dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan.

Kurangnya pemahaman terkait manajemen atau penatausahaan keuangan pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Pati merupakan faktor utama terkait kualitas sebuah laporan keuangan yang disajikan. Terlebih lagi, sebagian besar karyawan yang bekerja di BLUD Puskesmas Kabupaten Pati dengan latar belakang dari bidang kesehatan seperti bidan, perawat, Dokter, Promkes, Sanitarian, Nutrisionis, dan tenaga kesehatan lainnya. Meskipun keuangan merupakan peristiwa yang terjadi tiap hari, tetap saja mereka kurang memahami alur, sistem, dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan.

Penggunaan kebijakan akuntansi hanya sekedar diterapkan, tanpa dipahami bagaimana makna dan analisis setiap transaksinya. Keterbatasan tenaga yang membidangi ilmu akuntansi juga menyebabkan adanya tumpang tindih tanggung jawab, dimana seorang tenaga kesehatan juga berperan inti di tim keuangan. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan sistem pengendalian internal tim keuangan

BLUD Puskesmas untuk menjalankan operasional dengan baik dan tidak terjadi defisit anggaran. Kebijakan pimpinan BLUD Puskesmas juga memiliki pengaruh yang besar dalam penunjukan tim keuangan, untuk membangun sebuah tim yang solid dan mampu bekerja sama tim dengan baik. Selain itu, di era laporan serba online maka perlu dikembangkannya pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menyajikan laporan keuangan secara *real time* (Sumber : pengamatan pada BLUD Puskesmas di Kab. Pati).

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan BLUD Puskesmas diantaranya seperti kurangnya pemahaman terkait penatausahaan keuangan. Berdasarkan keputusan Bupati Lampung Barat No.B/382/KPTS/III.02/2020 bahwa 15 Puskesmas yang ada di Lampung Barat telah ditetapkan menjadi Puskesmas BLUD, pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD yang transparan dan akuntabel dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten sehingga proses penatausahaan keuangan dari mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sekretaris Dinas kesehatan menyatakan bahwa SDM yang ada di Puskesmas belum sepenuhnya memiliki kemampuan dalam penatausahaan keuangan BLUD, sehingga perlu adanya pendampingan oleh BPK Perwakilan Lampung dalam rangka pelatihan penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas. Selain itu sampai saat ini Puskesmas belum sepenuhnya memahami penatausahaan keuangan BLUD yang mengakibatkan kewajiban Puskesmas dalam menyampaikan laporan ke BPKAD terlambat. Sedangkan, pelaporan keuangan BLUD yang sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah bulan Januari sampai dengan Maret harus segera disampaikan paling lambat akhir bulan April tahun 2022. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Lambar menggelar pelatihan Penatausahaan Keuangan BLUD Puskesmas tahun 2022 di Aula Dinas Kesehatan pada hari Senin sampai Rabu (11-13/4) yang dihadiri oleh narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, dengan peserta kegiatan sebanyak 60 orang dari 15 Puskesmas, dimana masing-masing Puskesmas diwakili oleh Kepala Puskesmas, Kasubbag TU, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan. Dengan tujuan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam memahami penatausahaan keuangan BLUD serta terwujudnya penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dilansir dari (<https://Medialampung.co.id>).

Fenomena lainnya karena kasus korupsi, dimana juga mencakup dari aspek kualitas SDM, gaya kepemimpinan, serta juga pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan. Dilansir dari radar Lombok, puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GNP Tipikor dan Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Lombok Tengah mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah, Kamis (16/6) menyoroti penanganan kasus dugaan penggelapan pengelolaan anggaran di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Selanjutnya terkait penanganan tiga puskesmas, yakni Puskesmas Awang Kecamatan Pujut, Puskesmas Batujangkih Kecamatan Praya Barat, dan Puskesmas Batunyala Kecamatan Praya Tengah. Hasil pemeriksaan dari Inspektorat Lombok Tengah sebelumnya menemukan dugaan kerugian negara senilai Rp 300 juta. Namun kinerja inspektorat dalam

melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) masih diragukan publik, karena sebelumnya dari kejar pernah meminta Politeknik Kupang untuk melakukan perhitungan kerugian dan ditemukan indikasi sampai Rp 900 juta, sedangkan setelah dilimpahkan ke Inspektorat justru temuan melorot sangat jauh dengan hanya ditemukan kerugian Rp 300 juta. Dugaan bahwa ada kejanggalan mengapa penanganan kasus BLUD untuk PKKN dilimpahkan ke Inspektorat seolah-olah kasus korupsi di BLUD akan digiring menjadi kesalahan administrasi. Diungkapkan bahwa dalam kasus BLUD, tinggal menunggu hasil audit di BPKP, namun setelah ditelusuri di BPKP hanya menerima surat permohonan audit dan oleh jaksa belum memberikan dokumen yang akan diaudit. Dalam menangani kasus BLUD kejar meminta PKKN kepada Inspektorat dengan alasan di BPKP sumber daya manusia yang tersedia sangat terbatas (<https://radarlombok.co.id>).

Dalam penyusunan laporan keuangan BLUD, sering kali terdapat kurangnya tingkat kualitas sumber daya manusia pada instansi Dinas Kesehatan dalam hal ini yaitu Puskesmas. Sumber daya manusia yang ada dalam tim keuangan Puskesmas dengan latar pendidikan dunia medis yang dituntut untuk menyajikan suatu laporan keuangan merupakan hal baru bagi mereka. Meskipun sudah menggunakan teknologi sistem akuntansi tapi mereka tidak paham dengan siklus akuntansi, maka akan sulit untuk meminimalisir kesalahan. Rendahnya tingkat kekompakan dalam tim juga memiliki pengaruh yang besar pada pengumpulan komponen-komponen penyusunan laporan keuangan. Hal ini lah yang menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kurangnya tingkat kualitas laporan keuangan. Dalam dunia akuntansi yang sama belum tentu benar dan yang tidak

sama sudah pasti salah. Oleh karena itu hal -hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintahank terpisah dari standar akuntansi pemerintahan yang telah diterbitkan sebelumnya, yang telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) PMKNo. 217 tahun 2015 bahwa standar akuntansi pemerintahan Nomor 13 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan dari adanya Pernyataan Standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan. (Kesehatan *et al.*, 2021)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan & Rasmini (2021) yang menyatakan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Mahartini (2020) mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berkaitan dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan akan keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terwujudnya: (a) efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, (b) kendala laporan keuangan, (c) pengamanan aset negara. (Binawati dan Nindyaningsih 2022)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahartini, (2020) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas sumber daya manusia memiliki peranan utama yang penting dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Ilmu dasar dalam akuntansi harus dikuasai oleh sumber daya manusia pada bagian keuangan, meskipun sudah tidak menggunakan sistem pencatatan manual namun ilmunya

sangat diperlukan dalam proses pengecekan dan penyelesaian kasus transaksi yang berbeda setiap harinya. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas juga tidak terlepas dari dukungan seorang pemimpin. Pimpinan yang tegas dan disiplin dapat menjadi acuan tersendiri dalam jiwa karyawan untuk dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maysaroh (2018) menyatakan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tuban & Desipradani, (2022) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Seorang pemimpin harus mampu menciptakan pengaruh positif yang dapat mendorong tingkat semangat kerja para karyawan yang nantinya berdampak pada tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Keberhasilan suatu entitas merupakan peran utama dari seorang pemimpin. Dalam menciptakan suatu laporan keuangan yang berkualitas pemerintah juga harus memperhatikan suatu komitmen organisasi. Sebuah komitmen menggambarkan loyalitas seorang karyawan dan keinginan untuk aktif dalam berorganisasi serta berusaha membangun organisasi tersebut dengan nilai yang positif.

Berdasarkan data peneliti terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Veliani(2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh M Ulen (2019) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan sistem teknologi juga berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Dengan perkembangan zaman saat ini pemanfaat sistem teknologi teramat melejit, terutama dalam bidang akuntansi sistem informasi akuntansi disediakan mulai dari proses perencanaan sampai pada penyusunan keuangan. Pemanfaatan sistem teknologi dalam akuntansi dapat mempermudah akuntan dalam melakukan pembukuan yang mana dapat langsung disajikan laporan harian.

Dari data peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Penelitian lain yang dilakukan oleh Zubaidi *et al.*(2019) juga menunjukkan hasil hubungan positif signifikan atas pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wismoyo *et al.*(2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Puskesmas BLUD.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setiawan & Rasmini (2021). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama adanya penambahan variabel gaya kepemimpinan dan pemanfaatan teknologi. Terlepas berdasarkan rekomendasi dari jurnal utama, alasan penambahan variabel gaya kepemimpinan karena seorang pemimpin berperan penuh dalam sebuah *team work* pada entitas tersebut. Adanya tuntutan untuk bekerjasama tim yang solid juga menunjang hasil suatu komponen untuk menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Selanjutnya, alasan penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena di era milenial saat ini semua bidang berbasis online yang mana lebih efisien dan efektif.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan untuk mengontrol laporan keuangan secara *real time* kapanpun dan dimanapun. Penggunaan teknologi tidak terlepas dari komputer dan *software* untuk mengurangi tingkat kurang ketelitian pada manusia dalam pembuatan laporan keuangan. Semakin baik seorang pemimpin mengarahkan tim nya dan semakin baik entitas memanfaatkan teknologi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Perbedaan yang kedua terletak pada objek penelitian, pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Setiawan & Rasmini (2021) pada Universitas Udayana, sedangkan pada penelitian ini pada BLUD Puskesmas Se-kabupaten Pati sebagai objek penelitian. Alasan menggunakan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas sebagai objek penelitian dikarenakan Badan Layanan Umum Daerah menggunakan tata kelola keuangan yang cukup kompleks dalam pelaporan keuangan sehingga cocok untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Gaya Kepemimpinan, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Di Kabupaten Pati”**.

1.2 Ruang Lingkup

Mengingat dengan fenomena yang diteliti oleh penelititerdapat permasalahan dan keterbatasan dalam waktu penelitian, maka dalam penelitian ini

perlu adanya batasan permasalahan agar mudah dipahami, dan meminimalisir kesalahan penafsiran dari maksud dan tujuan penelitian ini.

Maka ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian adalah tim keuangan pada BLUD Puskesmas se-Kabupaten Pati.
2. Fokus penelitian untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD pada Puskesmas.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya terutama pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Pati, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati?
3. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati?
4. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati?

5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD di Puskesmas Kabupaten Pati?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Gaya Kepemimpinan, Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Blud Puskesmas Di Kabupaten Pati” adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas.
4. Memperoleh bukti empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas.
5. Memperoleh bukti empiris pengaruh pemanfaatan terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berbagai pihak seperti:

a. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas bagi mahasiswa di Universitas Muria Kudus.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan masukan bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pada OPD.

c. Bagi Puskesmas

Bagi pihak Puskesmas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas di Pati.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam mempelajari dan memahami masalah yang berkaitan fenomena baru pada bidang akuntansi.